



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang : 2009 - 2010
Masa Sidang : II
Rapat : Ke – 13 (tiga belas)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Kamis, 4 Februari 2010
Sifat : Terbuka
Pukul : 09.10 WIB s.d 13.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara : Evaluasi dan perencanaan program/kegiatan transportasi darat
Ketua Rapat : Muhidin M. Said, SE, MBA
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Direksi PT. DAMRI, Direksi PT. ASDP beserta jajaran terkait.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 09.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda rapat kerja hari ini adalah membahas evaluasi dan perencanaan program/kegiatan bidang transportasi darat dari Kementerian Perhubungan.
3. Ketua mempersilakan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan paparannya.
4. Ketua mempersilakan anggota Komisi V untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan daya serap keuangan yang hanya mencapai Rp. 1,675 Triliun atau 86,83% dari total anggaran dalam DIPA APBN TA 2009 sebesar Rp. 1,919 Triliun pada kondisi per 31 Desember 2009, agar tidak terulang lagi pada TA 2010.
2. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk memberi prioritas alokasi program/kegiatan yang mempertimbangkan perimbangan, pemerataan dan keadilan pembangunan antar wilayah/Provinsi di Indonesia, utamanya pada provinsi-provinsi kepulauan, daerah tertinggal, terpencil dan terdepan.

3. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan konsep yang utuh sesuai amanah UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, terkait kewajiban Pemerintah untuk menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang, utamanya penyediaan angkutan umum bus, dan pemenuhan penyediaan perlengkapan jalan.
4. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk segera menyempurnakan perencanaan program/kegiatan dengan melakukan re-evaluasi dan pemetaan berdasarkan provinsi. Selanjutnya, hasilnya diserahkan ke Komisi V DPR RI.
5. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua pembangunan terminal yang dibiayai oleh APBN hingga TA 2009, dan segera menyampaikan hasilnya ke Komisi V DPR RI.
6. Komisi V DPR RI mendukung upaya Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran pada Renstra 2010-2014 yang sebesar Rp. 17 Triliun dari alokasi anggaran pada RPJMN 2010-2014 yang hanya sebesar Rp. 11,8 Triliun.

CATATAN:

- 1) Terkait penjelasan PT ASDP dan Perum DAMRI yang belum menyertakan data, maka akan diagendakan pada rapat pembahasan selanjutnya.
- 2) Segera menyampaikan Renstra 2010-2014 kepada Komisi V DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB.

Jakarta, 4 Februari 2010

KETUA RAPAT,

ttd

MUHIDIN M. SAID, SE, MBA

